

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pada tatanan sistem ekonomi di tingkat negara, bank memainkan peran penting sebagai institusi keuangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank memiliki peran utama sebagai perantara keuangan (*intermediary institution*). Peran ini terlihat dari kemampuannya dalam menghubungkan pemilik dana berlebih yang menjadi sumber pendanaan bagi pihak yang sedang mengalami kekurangan dana. Bagi pihak yang surplus, bank menyediakan berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, serta deposito. Sementara itu, bagi pihak yang defisit, bank memberikan akses terhadap pendanaan melalui fasilitas kredit.

Pada praktik perbankan di Indonesia, lembaga keuangan diklasifikasikan berdasarkan cakupan kegiatan serta jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kasmir (2014) menyatakan bahwa bank di Indonesia dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum beroperasi dengan jangkauan layanan yang lebih komprehensif serta mampu melayani berbagai segmen nasabah, seperti kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, serta memberikan berbagai layanan tambahan yang menunjang aktivitas ekonomi,

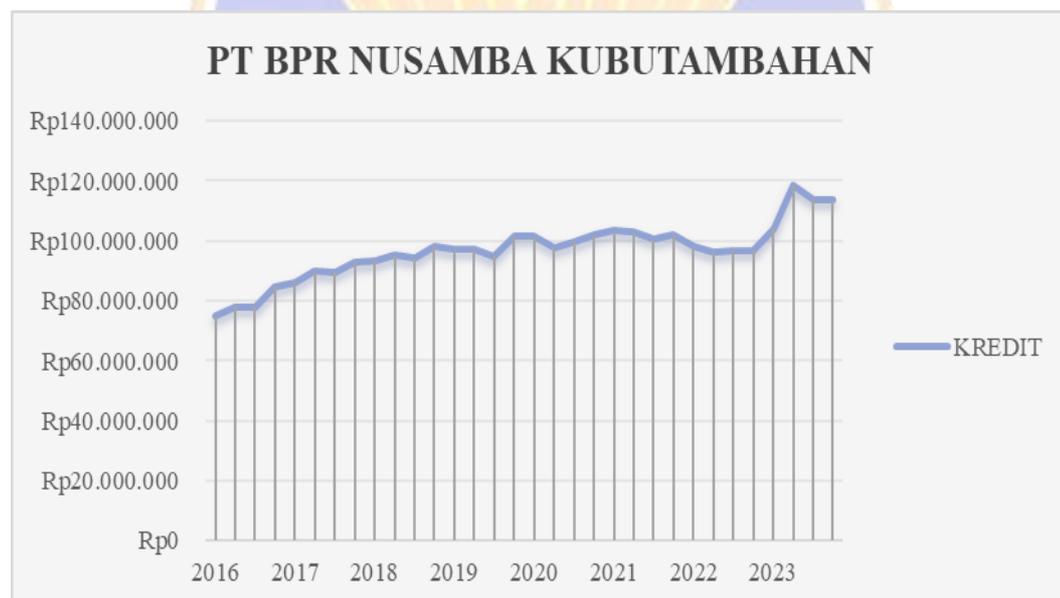
termasuk transaksi lintas negara dan layanan pembayaran. Sebaliknya, BPR memiliki lingkup operasional yang lebih terbatas, yang mana hanya diperkenankan menerima simpanan melalui penghimpunan dana berupa tabungan dan deposito berjangka, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit, tetapi tidak diperbolehkan ikut serta dalam transaksi valuta asing maupun lalu lintas pembayaran.

Yunitasari (2019) menyebutkan bahwa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki peran khusus dalam memfasilitasi kepentingan pelaku usaha dengan skala operasional yang tergolong mikro hingga menengah dengan lokasi yang biasanya tersebar di daerah yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran BPR bertujuan untuk membantu mengatasi masalah permodalan yang sering dihadapi usaha kecil, sehingga mendorong pertumbuhan usaha tersebut dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Pemberian kredit merupakan bagian utama dari fungsi intermediasi yang dilaksanakan oleh perbankan, yang mana kredit tersebut disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya, yang meliputi penghimpunan dana publik serta penyaluran kredit. Dengan adanya fasilitas kredit dari bank, para pelaku ekonomi dapat mendanai berbagai aktivitasnya, baik itu investasi, distribusi, maupun konsumsi., sehingga dapat mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. BPR pada umumnya menawarkan layanan kredit dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan proses yang lebih sederhana dibandingkan bank umum. Dengan jaringan yang luas dan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat setempat, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mampu menjangkau dan melayani nasabah yang mungkin tidak terjangkau oleh bank-bank

komersial besar. Hal ini berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada data laporan yang disajikan oleh OJK dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) tahun 2023, aktivitas distribusi kredit oleh BPR di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Sepanjang periode 2016 hingga 2023, pertumbuhan tersebut tercatat mengalami kenaikan rata-rata sekitar 8% setiap tahunnya. Tren ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kredit sebagai sumber pendanaan, yang mana pada akhir tahun 2023 telah mencapai total Rp141 triliun. Peningkatan ini mencerminkan potensi besar sektor BPR dalam mendukung akses permodalan yang lebih inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya sektor mikro, kecil, dan menengah. Namun, di tingkat lokal, salah satunya di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berdasarkan Lampiran A.1 menunjukkan adanya kesenjangan. Penyaluran kredit BPR di wilayah ini menunjukkan pola fluktuatif, terutama sejak masa pandemi *COVID-19*. Dampak pandemi menyebabkan penurunan signifikan dalam penyaluran kredit, dan belum menunjukkan pemulihan hingga tahun 2023. Hal ini bertolak belakang jika melihat data yang dimuat dalam laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali (DJPb, 2024) yang menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah debitur terbanyak di Provinsi Bali, yaitu sebanyak 3.637 debitur, melebihi Kota Denpasar (3.325 debitur) dan Kabupaten Gianyar (3.163 debitur). Keadaan ini mengindikasikan adanya tantangan yang dihadapi oleh BPR di daerah tersebut, termasuk dalam mempertahankan stabilitas kinerja mereka di tengah tekanan ekonomi, meskipun jumlah debitur yang tinggi seharusnya menjadi potensi bagi pertumbuhan kredit.

Berdasarkan Lampiran 1.1 yang menunjukkan data mengenai distribusi kredit oleh BPR yang beroperasi di Kabupaten Buleleng selama periode 2016 hingga 2023. Pada periode tersebut terlihat bahwa PT. BPR Bank Buleleng 45 cenderung mengalami penurunan dalam menyalurkan kreditnya, begitu pula yang terjadi di PT. BPR Nur Abadi, dan PT. BPR Kanaya. Sementara itu pada PT. BPR Indra dan PT. BPR Jaya Adi Mulia mengalami fluktuasi pada periode yang sama. Sedangkan pada PT. BPR Cahaya Bina Putra, PT. BPR Suryajaya Kubutambahan, dan PT. BPR Nusamba Kubutambahan cenderung mengalami kenaikan selama periode tersebut. Meskipun demikian, di PT. BPR Cahaya Bina Putra dan PT. BPR Suryajaya Kubutambahan pernah mengalami kontraksi signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan proses pemulihan menuju kondisi optimal memerlukan waktu yang relatif panjang. Berbeda halnya dengan PT. BPR Nusamba Kubutambahan, dimana BPR ini memiliki performa lebih stabil dibandingkan BPR lainnya yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1
Grafik Penyaluran Kredit PT. BPR Nusamba Kubutambahan
Periode Tahun 2016 – 2023

Pada Gambar 1.1, terlihat bahwa selama beroperasi BPR Nusamba Kubutambahan memiliki kinerja yang baik dan beberapa kali mendapatkan penghargaan seperti manajemen terbaik, kinerja terbaik, ROA terbaik, dan laba terbaik se-grup pada tahun 2020. Selain itu, berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *The Finance* (2024) PT. BPR Nusamba Kubutambahan merupakan satu - satunya BPR di Kabupaten Buleleng yang termasuk ke dalam Top 100 BPR dengan aset 100 miliar rupiah ke atas pada tahun 2024. Dimana pada studi tersebut dinilai berdasarkan berbagai indikator seperti asset total, kredit yang diberikan, DPK, laba tahun berjalan, CAR, ROA dan ROE, serta NIM, BOPO, NPL Net dan LDR. PT. BPR Nusamba Kubutambahan didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan utama mengelola dana masyarakat secara produktif untuk mendorong peningkatan kesejahteraan, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. PT. BPR Nusamba Kubutambahan berfokus pada memberikan pembiayaan kredit kepada para pelaku UMKM serta menawarkan produk tabungan dan deposito bagi masyarakat setempat.

Dalam sektor perbankan, potensi terjadinya gagal bayar merupakan risiko yang lazim terjadi, khususnya ketika debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya. Situasi semacam ini berpotensi menimbulkan kredit bermasalah, yang selanjutnya dapat membatasi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada debitur lainnya. Dengan demikian, menjadi krusial bagi bank untuk melakukan pengamatan yang cermat untuk memastikan apakah debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya atau tidak. Adapun menurut Kasmir (2012) mengemukakan bahwa penentu utama dari kebijakan penyaluran kredit sebuah bank bersumber dari kondisi internal atau tingkat kesehatannya.

Kesehatan bank ini, menurutnya, dapat dinilai dari berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi kecukupan modal yang direpresentasikan oleh CAR, tingkat likuiditas melalui LDR, kualitas aset yang tercermin dari NPL, dan kemampuan menghasilkan laba (rentabilitas) melalui ROA, NIM, serta BOPO. Meskipun terdapat banyak faktor, studi ini secara spesifik hanya akan meneliti peran NPL dan BOPO dalam mempengaruhi penyaluran kredit. Dikarenakan dalam penelitian Oktina dkk. (2021) serta Fitrianingisih dan Riyadi (2020) NPL sebagai faktor penentu utama atau faktor yang paling dominan. Akan tetapi, temuan berbeda ditunjukkan oleh Komaria dan Diansyah (2019) serta Howok dkk. (2023) yang justru menyatakan BOPO sebagai variabel dengan pengaruh paling kuat.

Tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) yang tinggi menjadi sebuah tantangan besar bagi kesehatan finansial bank. NPL sendiri didefinisikan sebagai kegagalan debitur dalam membayar kewajiban angsurannya Ismail (2010). Menurut Diyanti dan Widyarti (2012), angka NPL yang membengkak secara langsung berkorelasi dengan naiknya risiko kredit. Sebagai dampaknya, bank terpaksa menambah alokasi dana cadangan untuk menutupi potensi kerugian, sebuah tindakan yang berpotensi menggerus modal inti mereka (Sari dkk., 2021). Penurunan modal tersebut yang kedepannya menjadi salah satu penghambat utama bagi BPR untuk dapat menjalankan fungsi utamanya dalam menyalurkan pinjaman.

Efektivitas pengelolaan biaya oleh suatu bank tergambarkan melalui proporsi beban operasional terhadap pendapatan yang diperoleh dari aktivitas operasional (rasio BOPO), yang menunjukkan seberapa besar porsi pendapatan operasional yang harus dialokasikan untuk menutupi seluruh biaya operasional. Inefisiensi sebuah bank dalam mengelola pengeluaran operasionalnya tercermin

dari nilai BOPO yang tinggi. Sebaliknya, penurunan BOPO menandakan bahwa bank mampu mengelola biayanya dengan baik untuk menghasilkan pendapatan (Dendawijaya, 2015). Kegiatan inti perbankan didasarkan pada strategi memperoleh pendapatan bunga bersih merupakan hasil dari gap antara suku bunga atas dana yang dihimpun dan bunga atas dana yang disalurkan. Oleh karena itu, rasio BOPO menjadi alat ukur yang efektif untuk menilai bagaimana bank mengelola kinerja dan efisiensi operasionalnya.

Berdasarkan Lampiran 1.2 yang menunjukkan nilai NPL, BOPO dan penyaluran kredit PT. BPR Nusamba Kubutambahan periode tahun 2016-2023, dapat diketahui bahwa NPL PT. BPR Nusamba Kubutambahan mengalami peningkatan sebesar 8,01% pada tahun 2023, namun di saat yang sama penyaluran kredit pada tahun tersebut turut mencatatkan eskalasi hingga 17,19%. Begitu pula di tahun 2017 yang mana NPL mengalami peningkatan 144,5%, sedangkan penyaluran kreditnya tetap menunjukkan kenaikan sebesar 9,85%. Hubungan yang kontradiktif antara pergerakan NPL dan volume kredit yang disalurkan ini tidak mendukung pernyataan Ali (2004) yang menyebutkan bahwa NPL yang tinggi merepresentasikan besarnya risiko kredit yang dihadapi sebuah bank. Kondisi ini mendorong perbankan untuk meningkatkan porsi dana cadangan, suatu langkah yang berpotensi menggerus basis permodalan bank. Mengingat bahwa modal merupakan faktor esensial bagi ekspansi kredit, kenaikan NPL dapat menghambat kapasitas institusi dalam melakukan ekspansi pembiayaan. Perspektif ini memperoleh validasi empiris dari riset oleh Oktina dkk. (2021) yang mengonfirmasi bahwa NPL menunjukkan korelasi negatif yang signifikan dengan penyaluran kredit. Meskipun demikian, hasil studi yang berbeda ditunjukkan oleh

Fayaupon (2021), yang justru menemukan bahwa pengaruh dari NPL bersifat positif namun tidak signifikan.

Pada tahun 2019, terlihat bahwa BOPO PT. BPR Nusamba Kubutambahan terdapat peningkatan BOPO sebesar 2,10%, akan tetapi penyaluran kredit di tahun yang sama justru mengalami kenaikan sebesar 3,16%. Selain itu, BOPO pun mengalami tren naik pada tahun 2017 dengan kenaikan tercatat sebesar 2,52% dan penyaluran kreditnya tetap meningkat sebesar 9,85%. Hal tersebut tidaklah selaras pandangan Riyadi (2017) yang menegaskan bahwa efisiensi pengelolaan sumber daya oleh manajemen bank tercermin dari rendahnya rasio BOPO, yang mencerminkan upaya maksimal dalam meraih pendapatan. Tingkat efisiensi yang tinggi ini secara teoretis memungkinkan bank untuk lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit. Pandangan ini diperkuat oleh studi Haryanto dan Widyarti (2017), dimana menyimpulkan adanya korelasi negatif signifikan antara BOPO dan ekspansi kredit. Akan tetapi, temuan yang berlawanan disajikan oleh Hastuti dan Giri (2020), di mana penelitian tersebut justru menunjukkan bahwa BOPO memiliki dampak positif yang signifikan.

Berdasarkan adanya kesenjangan antara data dengan teori yang ada disertai adanya inkonsistensi temuan pada riset-riset sebelumnya. Oleh karena itu, riset ini diarahkan untuk menginvestigasi isu tersebut dalam sebuah kajian berjudul **"Pengaruh *Non Performing Loan* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan Periode 2016-2023)"**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka teridentifikasi beberapa pokok permasalahan pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan, yakni sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan volume penyaluran kredit di PT. BPR Nusamba Kubutambahan.
2. Terjadinya fluktuasi pada korelasi antara *non-performing loan* (NPL) dengan ekspansi kredit di PT. BPR Nusamba Kubutambahan.
3. Terjadinya fluktuasi pada pengaruh tingkat efisiensi operasional (BOPO) terhadap kapabilitas penyaluran kredit di PT. BPR Nusamba Kubutambahan.
4. Adanya ketidakkonsistenan antara hasil penelitian - penelitian terdahulu perihal dampak NPL dan BOPO bagi ekspansi kredit di BPR (Bank Perekonomian Rakyat)

1.3 Pembatasan Masalah

Bertolak dari serangkaian masalah yang telah diuraikan, ruang lingkup studi ini dikerucutkan pada penelaahan hubungan antara NPL serta BOPO dengan jumlah kredit disalurkan. Analisis ketiga variabel tersebut dilaksanakan dalam konteks studi kasus pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan yang merupakan lembaga keuangan yang berkantor pusat di Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada justifikasi riset yang telah diuraikan, maka isu-isu utama yang akan dikaji dalam studi ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Apakah *non-performing loan* (NPL) dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada PT. BPR Nusamba Kubutambahan Periode 2016-2023?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik dari *non-performing loan* (NPL) pada dinamika penyaluran kredit di PT. BPR Nusamba Kubutambahan untuk periode 2016-2023?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik dari biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) pada dinamika penyaluran kredit di PT. BPR Nusamba Kubutambahan untuk periode 2016-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Bertolak dari serangkaian pertanyaan penelitian yang telah diformulasikan, maka objektif yang ingin dituju dalam studi ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dampak kolektif dari NPL dan BOPO terhadap dinamika penyaluran kredit di PT. BPR Nusamba Kubutambahan selama periode penelitian.
2. Untuk menganalisis dampak parsial dari *non-performing loan* (NPL) terhadap volume penyaluran kredit di PT. BPR Nusamba Kubutambahan selama periode penelitian.
3. Untuk menganalisis dampak parsial dari biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap volume penyaluran kredit di PT. BPR Nusamba Kubutambahan selama periode penelitian.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari studi ini dirancang untuk menyumbangkan wawasan akademik sekaligus manfaat aplikatif, yang antara lain mencakup:

1. Manfaat Teoretis

Hasil riset ini diekspektasikan mampu menyumbangkan kontribusi dalam memperluas pengetahuan dan wawasan terkait implikasi NPL dan BOPO atas praktik distribusi kredit dalam lingkup BPR, terutama pada konteks kewilayahan setingkat Kabupaten Buleleng. Kajian ini pula diharapkan dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam industri perbankan, terutama dalam mengkaji dinamika penyaluran kredit di sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

2. Manfaat Praktis

Temuan empiris dari riset ini diproyeksikan dapat berfungsi sebagai landasan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis di sektor perbankan. Dengan pemahaman yang lebih lanjut mengenai dampak korelasi antara NPL dan BOPO dengan kebijakan alokasi kredit BPR, yang pada gilirannya dapat mengarahkan pada formulasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien serta mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat.